

InternationalMedia

SABTU 27 NOVEMBER 2021

HARGA ECERAN DALAM KOTA RP2500, LUAR KOTA+ONGKOS KIRIM



KUNJUNGAN KERJA MENKO MARVES DI BALI

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) didampingi Gubernur Bali Wayan Koster (kanan) meninjau Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) Sekar Tanjung, Desa Sanur Kauh, Denpasar, Bali, Kamis (25/11). Menteri Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi di Bali seperti TPS 3R Sekar Tanjung Denpasar serta hutan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai untuk meninjau kesiapan Bali sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada tahun 2022 mendatang.

Yayasan Tzu Chi Indonesia
Membasahi Ladang Batin dengan Welas Asih dan Kebijaksanaan (Master Cheng Yen)

intiland

Bagus™ Anti Bau
Penghilang bau tidak sedap...

ASALTAU!

Astaga! Seorang Anak Tega Jual Pintu hingga Genting Rumah Ibunya

TINDAKAN seorang pemuda di Bantul berinisial DRS, warga Dusun Paten Kapanewon Pundong, Bantul ini, membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Palsunya, ia tega menjual seluruh perabot rumah tangga milik ibunya tanpa izin. Konvolnya lagi, ia pun menjual daun pintu dan genting rumah yang mereka tempati. Akibat, sang ibu terpaksa melaporkan anak kandungnya ke polisi.

NP, seorang ibu berusia 53 tahun itu hanya bisa terganggu ketika melihat sejumlah perabot rumah tangga berupa kulkas, lemari, sampai daun pintu rumahnya berada di kantor Polsek Pundong, Bantul. Sejumlah perabot rumah tangga yang berada di kantor polisi itu adalah miliknya yang sempat dijual oleh anak lelaki semata wayangnya, DRS (24).

Sejumlah barang-barang yang dijual DRS berhasil diamankan Polisi dari beberapa pembeli di beberapa lokasi.

NP bercerita, sejak suaminya meninggal dunia 4 bulan lalu, dirinya terpaksa harus bekerja sebagai asisten rumah tangga agar bisa menyicil utang yang ditinggalkan suaminya.

Bersambung ke hal 11

NANO POLISH®
IDM000144822
SANDIMAS

ACE
The helpful place.

BANK MAYAPADA
Melayani Dengan Komitmen

KursRupiah

MATA UANG	JUAL	BELI
USD	14.405,00	14.230,00
SGD	10.655,00	10.350,00
AUD	10.312,00	10.112,00
EUR	16.287,00	16.032,00
HKD	1.885,00	1.800,00
GBP	19.342,00	18.957,00

Jumat 26 November 2021 16.45 WIB

Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK Sebab sejak Awal Sudah Bermasalah

Putusan MK yang menyebut UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat sudah diperiksa sejumlah kalangan. Sebab sejak awal proses pembuatannya sudah bermasalah.

JAKARTA (IM) - Tidak mengherankan kalau Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 'rontok' di Mahkamah Konstitusi. Sebab undang-undang 'sapu jagad' itu sejak awal sudah bermasalah.

Demikian ditegaskan pakar hukum tata Negara, Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Yusril, mestinya setiap pembuatan peraturan harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten-

tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, pemerintah malah menggunakan omnibus law.

"Ketika UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan meniru gaya omnibus law diuji formil dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, UU tersebut bisa dirontokkan oleh MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Jumat (26/11).

Yusril pun mengaku tak heran dengan putusan MK tersebut. Ia juga menyebutkan, pemerin-

tan masih beruntung MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat sehingga dapat segera melakukan revisi.

Yusril mengatakan, pemerintah harus bekerja keras dalam memperbaiki UU Cipta Kerja. Sebab, jika dalam jangka waktu dua tahun UU tersebut belum diperbaiki, semua aturan yang diatur UU Cipta Kerja akan kembali ke Undang-Undang yang lama. "Ini jelas dapat menimbulkan kekacauan hukum," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril menilai,

putusan MK tersebut berdampak luas terhadap kebijakan-kebijakan yang ingin dilakukan pemerintah yang sebagian besar berdasarkan pada UU Cipta Kerja.

"Tanpa adanya perbaikan segera, kebijakan baru yang diambil presiden otomatis terhenti, ini berpotensi melumpuhkan pemerintah yang justru ingin bertindak cepat memulihkan ekonomi yang terganggu akibat pandemi," tandasnya. Diberitakan,

Bersambung ke hal 11

Polisi Sita Rp8,9 Miliar Terkait Dugaan Korupsi PT PDS, Namun Belum Ada Tersangkanya

JAKARTA (IM) - Uang sebanyak Rp8,9 miliar disita polisi terkait kasus pidana korupsi anak perusahaan BUMN, yaitu PT Peruri Digital Security (PT PDS). Namun, polisi belum menetapkan satu orang pun tersangkanya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Auliansyah Lubis mengatakan, saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

"Dalam kasus ini kami belum menetapkan tersangka dan masih dalam penyidikan," kata Kombes Auliansyah di Polda Metro Jaya, Jumat (26/11).

Dalam mengungkap kasus ini polisi telah memeriksa 40 orang sebagai saksi.

Penelusuran dilakukan untuk

mengetahui siapa yang menikmati uang hasil dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

"40 orang tersebut juga termasuk pimpinan perusahaan," ujar Auliansyah menjelaskan.

Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan sebelumnya menjelaskan kronologis terungkap kasus dugaan korupsi tersebut terjadi pada 2018 di PT PDS yang melaksanakan pengadaan Penyediaan Data Storage, Network Performance Monitoring & Diagnostic, Siem dan Manage Service dengan nilai Rp. 13.175.586.047.

Anggaran tersebut bersumber dari kas operasional perusahaan PT. PDS.

Secara administratif proyek

Bersambung ke hal 11

WNI Tak Perlu Lagi Karantina Jika Masuk ke Arab Saudi

RIYADH (IM) - Pemerintah Arab Saudi telah mengizinkan warga dari beberapa negara -termasuk Indonesia - masuk lke negeri mereka tanpa protokol

karantina selama 14 hari di negara ketiga. Beberapa negara tercatat dalam hal ini, yakni Indonesia, Pakistan, India dan Mesir.

Dilansir dari Saudi Gazzete,

arahannya akan mulai berlaku mulai Rabu, 1 Desember 2021. Saudi Press Agency melaporkan

Bersambung ke hal 11

Mantan Menteri KP Edhy Prabowo Bakal Dijerat Kasus Pencucian Uang

JAKARTA (IM) - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo bakal dijerat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kasus TPPU itu

akan diusut KPK setelah putusan banding berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

"Jadi, kalau kemudian sudah mempunyai kekuatan hukum

tetap, setelah inkrah gitu ya, tentu kami akan segera pelajari pertimbangan dari putusan hakim

Bersambung ke hal 11

Waspada! Strain Covid yang Lebih Buruk dari Varian Delta Ditemukan di 3 Negara

NEW DELHI (IM) - Sejumlah ilmuwan memperkirakan mengenai apa yang diduga sebagai evolusi virus corona berbahaya, yang telah ditemukan pada pasien di berbagai belahan dunia.

Resistensi strain baru ini terhadap vaksin semakin menambah kekhawatiran.

Varian Covid-19 terbaru ini diketahui memiliki perubahan signifikan pada durinya, yang dapat membuatnya kebal terhadap vaksinasi.

Beberapa ilmuwan mengatakan, strain yang baru ditemukan itu bisa menjadi jenis virus corona yang paling

berevolusi, karena 32 mutasi tampaknya telah terdeteksi di dalamnya.

Sebagai perbandingan, strain Delta yang saat ini dominan dan sangat menular, yang telah berkontribusi pada lonjakan kasus tahun ini secara global, memiliki setidaknya 11 mutasi.

Strain baru ini awalnya terlihat pada tiga pasien di Botswana, dan dengan demikian dikenal sebagai varian Botswana. Sejak infeksi pertama pada 11 November varian ini telah ditemukan di tiga negara

Bersambung ke hal 11



KUNJUNGAN KERJA MENPAREKRAF DI WAKATOBI

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno (kedua kiri) memberikan piagam penghargaan ADWI 2021 ke Bupati Wakatobi Haliana di desa wisata Liya Togo, Wangi Wangi Selatan, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (25/11). Desa Liya Togo masuk ke dalam nominasi 50 desa terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021.

Kunjungi Website Kami di: <https://internationalmedia.co.id>